



Radar Bali

Kejari Dalam Tirta Yatra India

DENPASAR - Penanganan kasus korupsi di Kejari Denpasar memang kesannya lebih lambat ketimbang di Kejati Bali. Namun, kemarin (15/4) ada penjelasan menarik, terkait kasus dugaan korupsi di Badung dan Kota Denpasar. Dugaan penyimpangan anggaran di Pemkab Badung, urusan *tirta yatra* mulai digarap serius. Bahkan, pengumpulan data sudah mulai dilaksanakan.

Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir mengaku sudah mendapatkan perintah khusus, untuk segera bergerak urusan kasus dugaan korupsi di Pemkab Badung. Khususnya kasus *tirta yatra* di Pemkab Badung. Selama ini ada data masuk kasus dugaan penyimpangan di Inspektorat urusan dana *tirta yatra* ke Gunung Salak. Selain kasus ini muncul lagi kasus dugaan penyimpangan di Dinas Kebudayaan, yaitu *tirta yatra* ke India. "Kami sudah garap. Intinya kami akan bekerja dan bekerja ■

► Baca *Kejari...* Hal 31

hal. 1.

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 21 dan 31.



Sambungan -

Satu Jaksa, Satu Kardus Berkas Perdin

■ KEJARI

Sambungan dari hal 21

Untuk dugaan - dugaan kasus korupsi di Badung, kali ini data baru masuk terkait kasus korupsi *tirta yatra* ke India," ungkapnya.

Dia mengatakan informasi sementara atas kasus ini menggunakan dana sekitar Rp 900 juta lebih sampai Rp 1 miliar. "Anggarannya Rp 900 juta lebih. Kami masih dalam. Semoga nanti bisa kami segera dapat data - data atas penyimpangan ini," imbuhnya.

Namun, Syahrir tidak menjelaskan sudah sejak kapan turun ke Badung khusus kasus ini. Yang jelas dia berjanji akan menuntaskan kasus - kasus dugaan korupsi di Badung.

Bagaimana dengan kasus perjalanan dinas (Perdin) pemkot? Dia mengatakan kasus di pemkot terus dikembangkan, saat ini dia mengatakan data yang sudah dikumpulkan mencapai 4 kardus. "Awalnya 2 kardus ternyata sekarang sudah empat kardus data kami dapatkan," ungkapnya.

Dengan kondisi ini, dia memecah data itu terhadap empat jaksa di bawah kendali yang masuk tim. Dia mengatakan masing - masing jaksa tugasnya mempelajari data

satu kardus. "Saya bagi saja, biar cepat kerjanya. Satu jaksa di tim saya, saya beri satu kardus untuk dipelajari," ujarnya sambil tersenyum.

Jawa Pos Radar Bali juga mencari informasi perkembangan kasus dugaan korupsi Pemkot Denpasar di Kejati Bali. Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan mengatakan tim tetap bekerja mendalami kasus dugaan korupsi reklame atau mafia perizinan di Pemkot Denpasar. "Tetap memeriksa, namun *kayaknya* staf - staf," imbuhnya.

Sementara itu, pengakuan salah satu staf DTRP Kota Denpasar mengaku dari pihak Polresta Denpasar ketika ditanyai sejumlah wartawan, saat dirinya selesai diperiksa, Selasa (14/4) mengejutkan banyak pihak. Apalagi setelah dirinya mengaku sebagai staf PNS Polresta Denpasar. Staf itu adalah Dewa Made Wesnawa Wedagama. Ia adalah Kabid Pengendalian dan Penataan Kota DTRP Kota Denpasar yang diperiksa oleh Kejati Bali. Ia diperiksa menyusul atasannya yang sudah terlebih dahulu dipanggil pihak Kejati Bali untuk dimintai keterangan soal reklame di Kota Denpasar beberapa waktu lalu. Namun,

sikapnya yang enggan mengakui bahwa dirinya sebagai salah seorang staf di DTRP Kota Denpasar sangat disayangkan. Apalagi sampai mengaku bahwa dirinya dari Polresta Kota Denpasar.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Made Kusuma Diputra yang awalnya berusaha dihubungi koran ini melalui sambungan telepon, berkali-kali tidak kunjung menjawab. Baru setelah ditanya melalui pesan singkat dirinya bisa menjawab. Pihaknya, membenarkan, bahwa dua orang stafnya sudah dipanggil pihak Kejati Bali. "Ya, dua orang staf saya sudah diperiksa," ujarnya singkat, kemarin.

Ditanya balik soal siapa saja stafnya yang sudah diperiksa pihak Kejati Bali, Kusuma Diputra membeberkan ada dua stafnya yang sudah memenuhi panggilan kejati yaitu Kabid Pengendalian dan Penataan Kota Dewa Made Wesnawa Wedagama (yang mengaku PNS dari Polresta Denpasar) serta Kasi Sarana dan Prasarana Kota DTRP Kota Denpasar Gusti Made Dwi Utami. "Dua orang itu saja yang diperiksa, tidak ada yang lain dari kami," imbuhnya. (art/hen/yes)

hal. 2

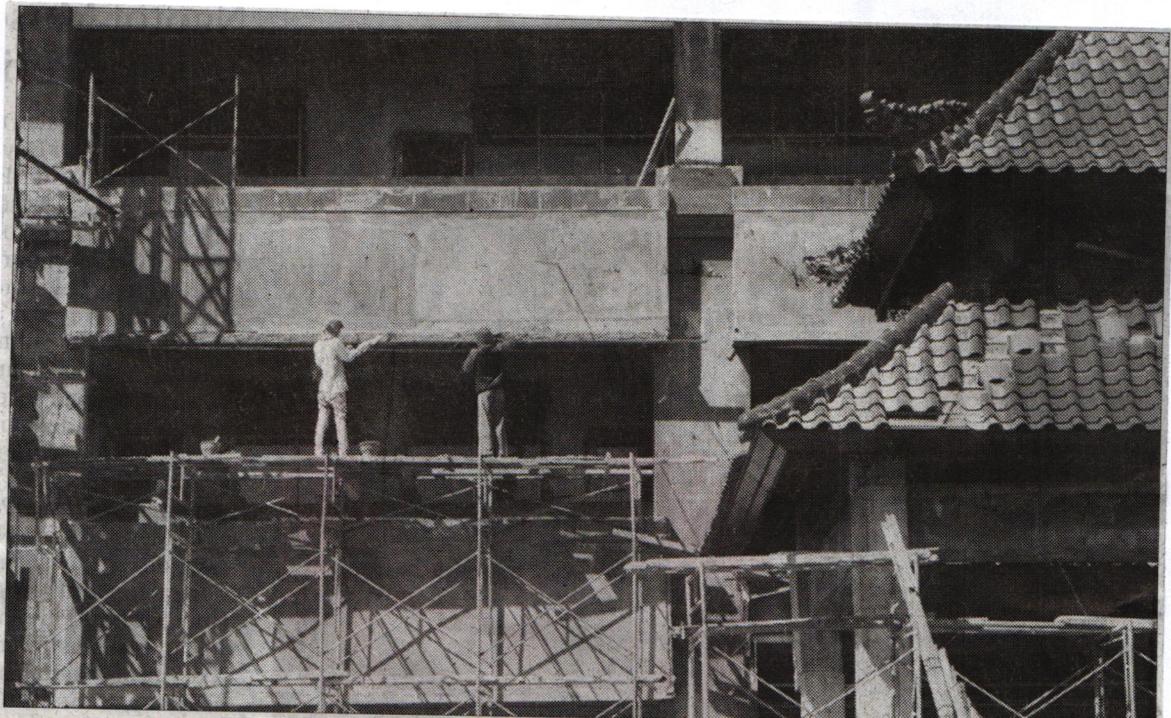
Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 21 dan 31



Proyek Rp 76 M

Abaikan Keselamatan Pekerja



MAULANA SANDIJAYA/RADAR BALI

ANCAM KESELAMATAN: Dua pekerja di proyek gedung E RSUD Badung, bekerja tanpa pengamanan memadai, kemarin.

MANGUPURA - Proyek pembangunan gedung E RSUD Badung yang menghabiskan dana Rp 76 miliar ternyata mengabaikan keselamatan para pekerja. Pantauan koran ini kemarin (15/4), belasan pekerja tidak ada yang dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan. Seperti sepatu, rompi dan helem khusus pekerja proyek. Para pekerja ini mengenakan baju kaus biasa ala kadarnya. Bahkan sebagian mengenakan sandal jepit.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Badung Ni Putu Dessy Darmayanti membantah pertanyaan koran ini. "Semua pakai perlengkapan kok, keselamatan pekerja lengkap. Semuanya pakai," ujar Dessy. Disinggung jika koran ini melihat sendiri, Dessy berdalih pekerja yang tidak memakai keselamatan kerja adalah tukang style Bali. Dikatakan Dessy, tukang yang mengerjakan style Bali tidak mau mengenakan perlengkapan keselamatan karena merasa risih. "Mereka (tukang style Bali, Red) tidak mau pakai masker dan helem. Katanya nggak nyaman bekerja. Kalau selain tukang style Bali semuanya lengkap kok," terang pejabat yang dikenal sebagai salat satu orang dekat bupati Gde Agung itu.

Ditambahkan Dessy, proyek direncanakan kelar pada tanggal 6 Agustus 2015 mendatang. Namun pihaknya berharap proyek bisa tuntas sebelum tanggal 6 Agustus, mengingat bertepatan dengan libur lebaran. (san/han)

Edisi : Kamis, 16 April 2015.

Hal : 24.



Rp 11 M, Anggaran Pilkada Jembrana

NEGARA - Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jembrana, akan dimulai Minggu nanti (19/4). Karena itu, anggaran yang selama ini belum ada kejelasan, kemarin (15/4), sudah disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jembrana. Total dana dana hibah yang akan diberikan sebesar Rp 11,4 miliar untuk KPUD Jembrana.

Anggaran itu belum termasuk untuk pengamanan dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jembrana yang baru terbentuk. Ketua KPUD Jembrana, I Gusti Ngurah Darmasanjaya mengatakan, anggaran untuk Pilkada Jembrana itu, sebanyak Rp 10,3 miliar dianggarkan induk, sedangkan sisanya akan dibahas di anggaran perubahan nanti.

Dana hibah tersebut, sudah termasuk antisipasi pemungutan suara ulang yang dianggarkan Rp 334 juta lebih. Sedangkan untuk tahapan hingga pelaksanaan pilkada yang rencananya 9 Desember dianggarkan Rp 11,1 miliar. Pengeluaran anggaran terbanyak untuk operasional

sebesar Rp 5,5 miliar. Terbanyak kedua honorarium dan uang lembur sebesar Rp 4,1 miliar dan untuk pembelian pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 1,3 miliar. "Tahapa masih pada rencana awal, 19 April dimulai," tegasnya.

Sementara itu, tiga orang komisioner Panwaslu Jembrana, sejak kemarin sudah berkantor di Kantor Panwaslu di Jalan Ngurah Rai, Negara, Jembrana.

Namun aktivitas awal mereka membersihkan kantor yang sudah rimbun dengan rumput liar dan di dalam kantor sangat kotor.

Ketua Panwaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan mengatakan, terkait tahapan Pilkada

Jembrana, mulai kemarin sudah menyiapkan kelengkapan sekretariat, termasuk meminta lima orang pegawai negeri sipil (PNS) untuk sekretariat Panwaslu ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana. Terkait anggaran untuk Panwaslu Jembrana, ketua Panwaslu pada Pileg dan Pilres ini mengatakan, sudah mendapat anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. Anggaran tersebut

dinilai masih kurang, sehingga pada anggaran perubahan nanti pihaknya meminta alokasi dana hibah untuk Panwaslu. "Dulu kami anggarkan untuk Pilkada

Rp 4,2 miliar, tapi yang disetujui sekarang hanya Rp 1,5 miliar untuk anggaran induk. Kekurangan akan ditambah di anggaran perubahan," pungkasnya. (bas/djo)





PENDIDIKAN

**Sekolah "Direbut" Pusat,
Bupati Gde Agung Galau**

SATU per satu aset milik Pemkab Badung mulai diambil pemerintah pusat. Setelah Terminal Tipe A Mengwi, dalam waktu dekat sekolah SMA/SMK negeri maupun swasta juga akan "direbut" pemerintah pusat. Melalui penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat mempercayakan pengelolaan sekolah-sekolah kepada Pemprov Bali. Kondisi ini pun membuat bupati Badung AA Gde Agung galau. Pasalnya, selama ini Pemkab Badung sudah banyak menggelontorkan dana untuk menghidupi sekolah, terutama sekolah swasta.

Misalnya SMKN 1 Petang yang berbasis pertanian. SMK yang ada diujung Badung Utara itu kini banyak dilirik masyarakat dengan penerimaan siswa terus meningkat. "Kami cukup khawatir dengan SMK Pertanian Petang yang kami asuh sejak bayi. Kami juga khawatir dengan SMA dan SMK swasta yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi SDM untuk pariwisata," ungkap Gde Agung ditemui kemarin (15/4). Secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Badung I Ketut Widya Astika menjelaskan, di Badung sendiri ada 8 SMA negeri, 19 SMA swasta, dan 2 SMK negeri, 11 SMK swasta. (san/han)

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 24



Radar Bali

Sepuluh Staf DKP Diperiksa Sekaligus

Dalam Kasus Dugaan
Pemerasan CPNS



KETUT SUGINA/BALI EXPRESS

DIPERIKSA LAGI: Sejumlah staf DKP Tabanan saat akan naik ke aula kejaan untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan CPNS, kemarin.

TABANAN - Kajari Tabanan terkesan sangat hati-hati menangani kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Tabanan. Terbukti sudah hampir beberapa bulan belum juga menetapkan tersangka. Penyidik masih saja terus berkutat pada pendalaman saksi-saksi. Bahkan, untuk melengkapi berkas pemeriksaan, sebanyak 10 saksi diperiksa sekaligus untuk dimintai keterangan tambahan, kemarin (15/4).

Dari pantauan koran ini, para saksi tiba di kantor Kejaan Tabanan sekitar pukul 10.15. Mereka datang secara berbarengan. Karena banyaknya saksi yang diperiksa,

pihak kejaan terpaksa menggiringnya ke aula di lantai II untuk diperiksa secara bersama-sama oleh pihak penyidik. "Karena rame, jadi kita periksa bersamaan di aula lantai II," ucap petugas di sana.

Pemeriksaan ini merupakan kali kesekian. Lantaran para saksi itu sudah berkali-kali diperiksa dan pemeriksaan kali ini adalah untuk meminta keterangan tambahan ■

► Baca *Sepuluh...* Hal 31

hal. 1

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 21 dan 31



Radar Bali

Sambungan

Dimintai Keterangan Tambahan

■ SEPULUH

Sambungan dari hal 21

Kasipidus Kajari Tabanan Fathur Rohman saat ditemui di ruangannya membenarkan, kali ini pihaknya memeriksa 10 orang saksi yang semuanya adalah staf DKP. Di antaranya Made Gn, Made Sd, Ni Made Sj, Ni Gst As, Ketut Sd, Dewa Made Ja, Ketut Rn, Ketut Md, Made St, dan Ni Wayan St. "Mereka datang bersamaan, makanya kami periksa bersamaan di aula," ucapnya.

Pemeriksaan kali ini sejatinya adalah pemeriksaan tambahan. Karena sebelumnya para saksi itu sudah pernah diperiksa penyidik. "Ini hanya pemeriksaan tambahan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, artinya kita tidak ingin gegabah dalam

kasus ini," ucapnya.

Selanjutnya pada Kamis hari ini (16/4), Fathur mengungkapkan pihaknya telah menjadwalkan untuk memeriksa lebih banyak lagi. "Besok (hari ini) kita jadwalkan memeriksa sekitar 12 orang saksi. Pemeriksaan besok (hari ini) juga pemeriksaan tambahan, untuk melengkapi keterangan yang bersangkutan sebelumnya," beber Fathur. Kapan kelarnya? Ditanya demikian pejabat asal Bojonegoro itu hanya tersenyum. "Sabar, kasus ini menyangkut orang banyak, jadi kami tidak ingin gegabah. Semuanya kita hitung betul sehingga tidak ada kesalahan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama sudah kelar," janji Fathur. (gin/yes)

hal. 2

Edisi : Kamis, 16 April 2015

Hal : 21 dan 31



Tinjau Proyek Fisik, Bupati Berharap Tanpa Masalah



HUMAS BADUNG FOR RADAR BALI

KUNKER: Bupati Badung AA Gde Agung (tiga dari kiri) bersama Wakil Bupati Badung I Made Sudiana saat kunjungan kerja meninjau kegiatan-kegiatan APBD Triwulan I tahun anggaran 2015, kemarin.

MANGUPURA - Bupati Badung A.A. Gde Agung bersama Wakil Bupati Badung I Made Sudiana, Sekda Badung Kompyang R. Swandika beserta Pimpinan SKPD terkait melaksanakan kunjungan kerja guna meninjau kegiatan-kegiatan APBD Triwulan I tahun anggaran 2015, Rabu (15/4). Ada sejumlah proyek fisik yang ditinjau meliputi : pembangunan gedung koperasi di areal Puspem Badung, Kantor Camat Mengwi, Gedung RSUD Badung, Kantor PMI dan KPAD di Abianbase, SPAM Penet Unit Distribusi Badung dan Denpasar, penataan taman telajakan dan median jalan simpang dewa ruci, pembangunan Long Storage Tukad Mati, dan penambahan sarana infrastruktur air bersih di Badung Selatan. Bupati Gde Agung saat jumpa pers dengan awak media menekankan bahwa, kunjungan triwulan pertama ini, sebagai evaluasi secara langsung kegiatan fisik di lapangan. Dijelaskan, proyek yang ditinjau merupakan proyek strategis yang langsung memberikan pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan, harkat, martabat masyarakat, seperti Ge-

dung E RSUD Badung maupun SPAM Penet. Disebutkan proyek Rumah Sakit (RS) ini merupakan proyek tahun jamak dan saat ini telah berjalan baik. Bangunan Gedung blok E tersebut difungsikan untuk VIP, super VVIP dan standard. "Untuk memenuhi standard pelayanan tersebut kita dituntut untuk memberikan pelayanan medis yang bertaraf internasional. Oleh karena itu kita menyiapkan ruangan, tenaga medis (SDM) termasuk menyiapkan UGD, peralatan dan syarat

lingkungan," jelasnya. Untuk pelayanan air bersih tukad penet telah berjalan dengan baik melalui dana Pusat. Sementara saluran/pipa dibangun dari dana APBD Provinsi yang konek dengan APBD Kab Badung. Pembangunan SPAM ini untuk memenuhi kebutuhan air di Badung Selatan. "Proyek multi years tersebut belum sepenuhnya selesai, masih terjadi kendala pada pemasangan jaringan pipa yang dilaksanakan APBD Provinsi. Nanti setelah selesai akan menghasilkan 300 liter

per detik, dimana Badung memanfaatkan 150 liter untuk Selatan," jelasnya. Selain itu juga ditinjau pembangunan instalasi Air bersih di Tegeh Sari. Diharapkan, melalui proyek air bersih ini, pada bulan April 2016, Badung Selatan sudah dapat dialiri air bersih. Bupati menambahkan selain kedua proyek tersebut, pihaknya juga meninjau pembangunan gedung pelayanan yaitu gedung koperasi dan UKM yang akan dilengkapi stand koperasi serba usaha maupun simpan pinjam.

Selain itu, pembangunan Kantor Camat Mengwi yang memanfaatkan eks BPP Pertanian Mengwi. Dengan status tanah hibah dari Provinsi kepada Badung. Pembangunan Kantor Camat Mengwi ini akan dilengkapi 3 (tiga) bangunan, yaitu pelayanan, Kantor Camat dan Pura serta Parkir. Sementara tanah kantor Camat yang dulu merupakan tanah Desa Adat Mengwi dan akan dimanfaatkan menjadi kawasan hijau dan lahan parkir obyek wisata Taman Ayun sehingga tidak ada parkir lagi di depan patung Bima Sakti bencingah Puri Ageng Mengwi. (adv)

Edisi : Kamis, 16 April 2015.

Hal : 24